

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP
TERDAKWA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI BAWAH KETENTUAN MINIMUM KHUSUS
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI DI PENGADILAN
NEGERI JAKARTA PUSAT)**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD FAISAL RAKHA PRATAMA

201710115147



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP
TERDAKWA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI BAWAH KETENTUAN MINIMUM KHUSUS
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI DI PENGADILAN
NEGERI JAKARTA PUSAT)**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD FAISAL RAKHA PRATAMA

201710115147



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul skripsi :Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Di bawah Ketentuan Minimum Khusus Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat).

Nama Mahasiswa :Muhammad Faisal Rakha Pratama.

Nomor Pokok Mahasiswa :201710115147.

Program Studi/ Fakultas :Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 1 oktober 2021
MENYETUJUI.

Pembimbing I



Dr. Rahman Amin, SH., MH

NIDK.8802323419

Pembimbing II



Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH., MH

NIDN.0331017006

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi :Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa
Tindak Pidana Narkotika Di bawah Ketentuan
Minimum Khusus Menurut Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat).

Nama Mahasiswa :Muhammad Faisal Rakha Pratama

Nomor Pokok Mahasiswa :201710115147

Program Studi / Fakultas :Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi :22 Oktober 2021

Bekasi, 1 oktober 2021
MENYETUJUI.

Ketua Penguji :Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM
NIDN.0312117102

Penguji I :Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.Kom., SH., MH
NIDN.0313046804

Penguji II :Dr. Rahman Amin, SH., MH
NIDK.8802323419

id. Sartika
.....
Edi
.....
Rahman
.....

Bekasi, 1 oktober 2021
MENYETUJUI.

Ketua Program Studi
Ilmu hukum



Clara Ignatia Tobing, SH., MH
NIDN. 0314029002

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama :Muhammad Faisal Rakha Pratama

NPM :201710115147

TTL :Bekasi, 3 Februari 2000

Prodi :Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Di bawah Ketentuan Minimum Khusus Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat).” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya dituliskan dengan sangat jelas sesuai kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan perlakuan yang berlaku.

Bekasi, 1 oktober 2021

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Faisal Rakha Pratama

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPOENTINGAN AKADEMIS.**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama :Muhammad Faisal Rakha Pratama

NPM :201710115147

TTL :Bekasi, 3 Februari 2000

Prodi :Ilmu Hukum

Fakultas :Hukum

Jenis Karya :SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif (*Non Exclusive Royalt-Free Rights*) atas karya ilmiah yang berjudul: **“Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat).”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non- eksekutif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data. (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 1 oktober 2021

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Faisal Rakha Pratama

ABSTRAK

Muhammad Faisal Rakha Pratama, 201710115147, Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika di bawah Ketentuan Minimum Khusus Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat).

Perkara tindak pidana Narkotika saat ini semakin marak terjadi di Indonesia sehingga membutuhkan upaya penanggulangan melalui hukum pidana. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentunya dibuat untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi sering kali dalam sebuah persidangan terkhususnya perkara Narkotika terjadi sebuah penyimpangan dalam putusan hakimnya, hal ini bisa terjadi karena hakim menjatuhkan putusan pidana dibawa batas ketentuan pidana minimum dalam undang-undang. Misalnya pada putusan Perkara Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst, Perkara Nomor 952/Pid.Sus/2017/PN.JKT.PST. Pst., Perkara Nomor 634/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst .

Penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara berfokus pada bahan Pustaka atau data sekunder dan studi kasus.

Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, diatur dalam pasal 111 hingga pasal 148 Bab. XV dan dalam hal ini pengaturan pidana minimum khususnya dikelompokkan sebagai berikut: tindak pidana berkaitan dengan produksi Narkotika, tindak pidana berkaitan dengan jual beli Narkotika, tindak pidana berkaitan dengan pengangkutan dan transito Narkotika, tindak pidana berkaitan dengan penguasaan Narkotika, tindak pidana berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika. melalui pertimbangan nya hakim dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus pada pasal 112 maka hakim menetapkan terdakwa sebagai pelanggar pasal 127 ayat (1) dimana dalam hal ini para terdakwa ditetapkan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan 1 karena dalam hal ini barang bukti yang ditemukan tergolong cukup kecil karena dibawah 1 (satu) gram. Dalam Perkara Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst Perkara Nomor 952/Pid.Sus/2017/PN.JKT.PST. Pst., Perkara Nomor 634/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst .

Kata kunci: Sanksi pidana, Tindak pidana, Narkotika, Ketentuan Minimum Khusus.

ABSTRACT

Muhammad Faisal Rakha Pratama, 201710115147 *The Enforcement of Criminal Sanctions Against Drug Offender Defendants under Special Minimum Provisions According to Law No. 35 of 2009 on Narcotics (Study in Central Jakarta District Court).*

Narcotics criminal cases are currently increasingly prevalent in Indonesia so that it requires countermeasures through criminal law. Law No. 35 of 2009 on Narcotics is certainly made to prevent narcotics abuse that occurs in Indonesia. But often in a trial especially narcotics cases occur a deviation in the judge's verdict, this can happen because the judge imposes a criminal verdict brought the minimum criminal provision limit in the law. For example, in the decision of Case Number 688/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst., Case Number 952/Pid.Sus/2017/PN.JKT. PST. Pst., Case Number 634/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst

The research used is normative legal research conducted by focusing on library materials or secondary data and case studies.

Law number 35 of 2009 on Narcotics, stipulated in articles 111 to article 148 chapter. XV and in this case the minimum criminal arrangements are especially grouped as follows: criminal acts related to the production of Narcotics, criminal acts related to the sale and purchase of Narcotics, criminal acts related to the transportation and transit of Narcotics, criminal acts related to the possession of Narcotics, criminal acts related to the misuse of Narcotics. Through his consideration of the judge by deviating the special minimum criminal provisions in article 112, the judge determined the defendant as a violator of article 127 paragraph (1) where in this case the defendants were designated as abusers of Narcotics Group 1 because in this case the evidence found was quite small because it was under 1 (one) gram. In Case Number 688/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst Case Number 952/Pid.Sus/2017/PN.JKT. PST. Pst., Case Number 634/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst

Keywords: *Criminal sanctions, Narcotics crime, special Minimum provisions*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang mana merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Adapun judul skripsi penulis adalah Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang masih dimiliki, Penulis sangat menyadari bahwasannya skripsi dengan judul tersebut diatas masih terdapat banyak kekurangan, dan kelemahan sehingga sangat jauh dari kata sempurna. Selain itu skripsi ini sendiri tentunya tidak akan selesai sebagaimana mestinya tanpa adanya bantuan dari para pihak. Untuk itu pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Drs. Bambang Karsono, SH., MH., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH., MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfirda Ade Putri, SH., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, SH., S.Pd., MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Clara Ignatia Tobing, SH., MH., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak Dr. Rahman Amin, SH, MH Dosen Pembimbing I.
8. Bapak Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH, MH selaku Dosen Pembimbing II.
8. Ibu Oti Handayani, SE., SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Akadeimik.

9. Kepada seluruh Bapak/Ibu pegawai Dinas Pengadilan Negeri kota Jakarta Pusat.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Ibu Nurmala Sutarini, SE. selaku Ibu kandung
12. Bapak Mayor CBA Sri Suryo Saputro. Selaku Kabagtaljuang TNI AD dan ayah kandung.
13. Serta seluruh keluarga yang memberikan semangat, doa, dan dukungan kepada penulis.
14. Untuk temanku, Seluruh rekan-rekan Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2017 dan teman sekelas A2 yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
15. Terimakasih juga untuk Ni Made Padmawati atas bantuan dan dukungan nya selama pengerjaan skripsi
16. Seluruh Pihak yang telah turut membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada Penulis. Penulis Mohon di maafkan apabila banyak sekali kekurangannya, semoga penelitian ini bermanfaat bagi yang membacanya. Penulis menerima kritik dan saran dari pembaca serta bimbingan dari para penguji agar menjadi pedoman penulis di masa yang akan datang.

Bekasi, jumat 1 oktober



Muhammad Faisal Rakha Pratama

NPM: 201710115147

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPOENTINGAN AKADEMIS.	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Rumusan masalah	5
1.4. Tujuan dan manfaat penelitian.....	6
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	6
1.4.2. Manfaat penelitian.....	6
1.5. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran.....	7
1.5.1. Kerangka Teori	7
1.5.1.1. Teori Negara Hukum.....	7
1.5.1.2. Teori Penegakkan Hukum.....	9
1.5.1.3. Teori pemidanaan.....	11
1.5.1.4. Teori penemuan hukum	14
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	17
1.5.3. Kerangka Pemikiran	21
1.6. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian pidana dan jenis-jenisnya.....	23
2.1.1. Pengertian pidana	23
2.1.2. Jenis-jenis pidana.	25

2.1.2.1.	Pidana Pokok	25
2.1.2.1.1.	Pidana Mati	25
2.1.2.1.2.	Pidana Penjara	25
2.1.2.1.3.	Pidana Kurungan	27
2.1.2.1.4.	Pidana Denda	28
2.1.2.2.	Pidana Tambahan	29
2.1.2.2.1.	Pencabutan Hak-hak Tertentu	30
2.1.2.2.2.	Perampasan Barang-barang Tertentu	31
2.1.2.2.3.	Pengumuman Putusan Hakim	31
2.2.	Pengertian tindak pidana dan unsur-unsurnya	32
2.2.1.	Pengertian Tindak pidana	32
2.2.2.	Unsur-unsur Tindak pidana	33
2.2.2.1.	Unsur Objektif	33
2.2.2.2.	Unsur Subjektif	34
2.3.	Tindak pidana Narkotika	34
2.3.1.	Pengertian Narkotika	34
2.3.2.	Jenis-jenis Narkotika	35
2.3.3.	Tindak pidana Narkotika	35
2.4.	Pengertian Terdakwa	36
2.4.1.	Terdakwa	36
2.4.2.	Hak tersangka dan Terdakwa	37
2.5.	Tinjauan tentang Kekuasaan Kehakiman	40
2.5.1.	Pengertian tentang hakim	40
2.5.2.	Kebebasan hakim	40
2.5.3.	Penemuan hukum oleh hakim	43
BAB III. METODE PENELITIAN		
3.1.	Metode Penelitian	48
3.2.	Jenis Penelitian	48
3.3.	Metode Pendekatan	49
3.4.	Sumber Bahan Hukum	50
3.5.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	51

3.6. Metode Analisa Bahan Hukum	51
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	
4.1. Kententuan Pidana Minimum Khusus terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.	53
4.1.1. Pidana Minimum Khusus.....	53
4.1.2. Ketentuan Minimum Khusus dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.	55
4.1.2.1. Tindak Pidana Berkaitan dengan produksi Narkotika.	55
4.1.2.2. Tindak Pidana Berkaitan dengan Jual Beli Narkotika.	58
4.1.2.3. Tindak Pidana Berkaitan dengan Pengangkutan dan Transito Narkotika.	64
4.1.2.4. Tindak Pidana Berkaitan dengan Penguasaan Narkotika.	68
4.1.2.5. Tindak Pidana Berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika.	73
4.2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibawah ketentuan minimum khusus menurut Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. 77	
4.2.1. Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst Tanggal 21 Agustus 2017.....	77
4.2.1.1. Posisi kasus.....	77
4.2.1.2. Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum.	78
4.2.1.3. Pertimbangan Hakim.....	79
4.2.1.4. Analisis.....	81
4.2.2. Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 952/Pid.Sus/2017/PN.JKT.PST Tanggal 3 Oktober 2017.	84
4.2.2.1. Posisi kasus.....	84
4.2.2.2. Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum	85
4.2.2.3. Pertimbangan Hakim.....	86
4.2.2.4. Analisis.....	88
4.2.3. Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Terakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 634/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst Tanggal 22 Agustus 2017	95
4.2.3.1. Posisi Kasus.....	95

4.2.3.2.	Pasal Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum.	96
4.2.3.3.	Pertimbangan Hakim	96
4.2.3.4.	Analisis.....	99
BAB V. PENUTUP.....		
5.1.	Kesimpulan.....	106
5.2.	Saran	108
DAFTAR PUSTAKA.....		109
Lampiran-Lampiran.....		114
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....		164



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kasus Perkara Narkotika yang dijatuhi sanksi pidana dibawah ketentuan minimum khusus oleh para hakim.	2
---	---

